

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran

2.1.1.1 Pengertian Anggaran

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa “Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi”.

Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”.

Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa:

Anggaran publik merupakan kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) mendatang. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja (*output*) terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan masa mendatang. Karena anggaran merupakan hasil kerja (*output*), anggaran dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Sementara itu, penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja (Lubis, 2011: 226).

2.1.1.2 Siklus Anggaran Sektor Publik

Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Menurut Mardiasmo (2011) siklus anggaran meliputi empat tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan Anggaran (*budget preparation*)
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.
2. Tahap Ratifikasi Anggaran (*budget ratification*)
Pada tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.
3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*budget implementation*)
Dalam tahap pelaksanaan anggaran ini, hal terpenting yang harus diperhatikan manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.
4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran
Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemui banyak masalah

2.1.1.3 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*Performance based budgeting*) pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output.

Anggaran berbasis kinerja menurut Halim (2012:177) yaitu:

Menurut Halim dalam Kusufi (2014:55) Anggaran berbasis kinerja, yaitu: Anggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran dalam sektor publik yang disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan

atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan yang pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam pengambilan keputusan.

Dalam penjelasan PP nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dinyatakan bahwa anggaran dengan pendekatan berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Setiap input yang ditetapkan dalam anggaran harus dapat diukur hasilnya dan pengukuran hasil bukan pada besarnya dana yang telah dihabiskan sebagaimana yang dilaksanakan pada sistem penganggaran tradisional (*line-item & incremental budget*) tetapi berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.1.4 Unsur-Unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tahun 2008 unsur-unsur anggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. Pengukuran Kinerja, pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 - a. Menentukan Program dan Kegiatan dengan Jelas
 - b. Sistem Informasi yang Memadai
 - c. Pihak Eksternal (*independen*)
 - d. Kinerja Yang Strategis (*key performance indicators*)
2. Penghargaan dan Hukuman (*Reward and Punishment*), pelaksanaan penganggaran berdasarkan kinerja sulit dicapai dengan optimal tanpa ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja yaitu berupa ganjaran dan hukuman (*Reward and Punishment*) bagi para pelaksana penganggaran. Penghargaan dan hukuman (*Reward and Punishment*) tersebut diantaranya adalah:
 - a. Penerapan Insentif Atas Kinerja yang dicapai dan Hukuman
 - b. Penerapan Efisiensi (*savings*).
 - c. Penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga.
3. Kontrak Kinerja, jika penganggaran berdasarkan kinerja telah dapat berkembang dengan baik, kontrak atas kinerja dapat mulai diterapkan. Atas nama pemerintah, Departemen Keuangan dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu kinerja dengan kementerian negara/

lembaga teknis lainnya, begitu juga antara menteri dengan unit organisasi di bawahnya. Walaupun demikian, suatu sistem kontrak kinerja harus didukung oleh faktor-faktor berikut ini:

- a. Definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan
 - b. Kewenangan yang ada bagi pihak kementerian negara/ lembaga untuk mengelola sumber daya yang ada.
4. Kontrol Eksternal dan Internal, sistem kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan oleh badan di luar pengguna anggaran. Kontrol diarahkan pada kontrol *input* suatu kegiatan, serta apa dan bagaimana pencapaian *output*. Menciptakan kontrol yang efektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Adanya pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga pengguna anggaran,
 - 2) Kontrol dilakukan pada *input*, *output* dan *outcome*,
 - 3) Kontrol dilakukan sebelum dan sesudah anggaran digunakan.

Pertanggungjawaban Manajemen, bila sistem penganggaran yang lama menekankan pada kontrol terhadap *input*, maka di dalam sistem penganggaran berbasis kinerja difokuskan pada *output*. Prinsip dasar di dalam sistem ini adalah manajer pengguna anggaran harus diberi kebebasan penuh bisa akuntabilitas atas pencapaian *output* yang ingin dicapai.

2.1.1.5 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyebut bahwa

kementerian negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, suatu anggaran yang baik bagi pelaksanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran berbasis kinerja yang dikemukakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2009 sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran strategis K/L
2. Penetapan outcome, program, output, dan kegiatan
3. Penetapan indikator kinerja utama program dan kegiatan
4. Penetapan standar biaya
5. Penghitungan kebutuhan anggaran
6. Pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan

7. Pertanggungjawaban

8. Pengukuran dan evaluasi kinerja

Jadi dari pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran dalam sektor publik yang disusun dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai, dan dimensi anggaran berbasis kinerja yaitu pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, dan pertanggungjawaban manajemen

2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi.

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 tentang SAP , mengatakan “serangkaian prosedur manual mau pun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pelaporan posisi keuangan, pengikhtisaran pencatatan, dan operasi keuangan pemerintah”.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Menurut Haryadi dalam Rusman (2015:84) teknologi informasi diartikan

Sebagai teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang lahir karena adanya dorongan-dorongan kuat untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mengatasi kelambatan manusia mengolah informasi.

2.1.3 Komitmen Organisasi

Dalam dunia kerja komitmen karyawan memiliki pengaruh yang sangat penting, bahkan ada beberapa organisasi yang berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu syarat untuk memegang jabatan/posisi yang ditawarkan dalam iklan lowongan kerja. Keberhasilan pengelolaan organisasi sangatlah ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola SDM. Tinggi rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja, sangatlah menentukan kinerja yang akan dicapai organisasi.

Menurut Robbins dalam Anurti (2013) komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara/mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu.

Mowday dalam Sabrina (2011) mengemukakan bahwa komitmen organisasi

terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi, yang antara lain adalah:

1. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
2. Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.

Loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

2.1.4 Akuntabilitas

Menurut Bastian (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan:

Sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang /badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

2.1.4.1 Akuntabilitas Kinerja

Menurut Bastian (2010) Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Tuntutan publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan

yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa Akuntabilitas adalah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam Pasal 1 ayat 35 Peraturan Pemerintah Pasal 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan negara menyebut bahwa Kinerja adalah Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam pasal 39 penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterikatan dan program termasuk efisiensi pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kerja, analisis standar belanja, satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan kepada daerah, dan standar pelayanan minimal.

2.1.4.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Djalil (2014:63) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan:

Akuntabilitas sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang memunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang memunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk bertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamankan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui LAKIP yang disusun secara periodik.

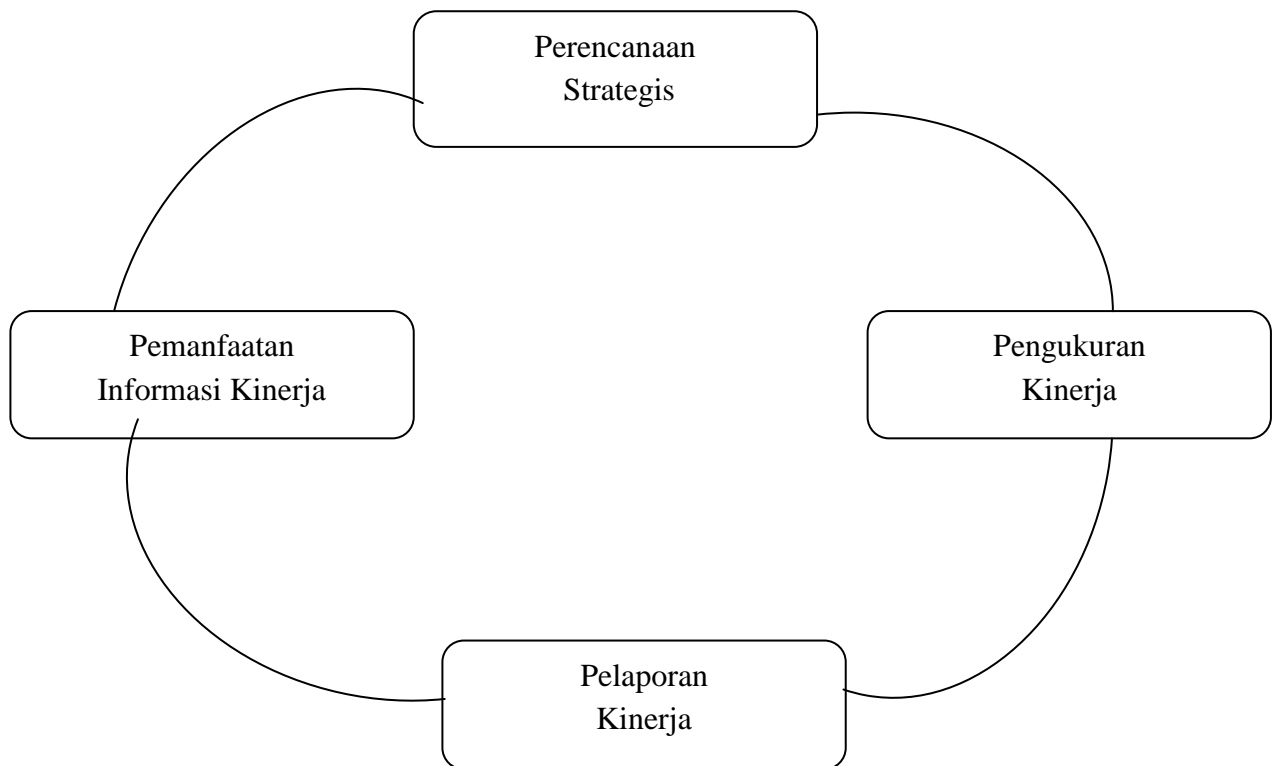
Dalam Pasal 1 ayat 19 entitas akuntabilitas kinerja OPD adalah unit instansi daerah selaku pengguna atau kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan pengelolaan dan pelaporan data kinerja. Dalam Pasal 1 juga menyatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator kinerja program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari satu program yang merupakan pelaksana tugas pokok dari fungsi suatu Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh organisasi kerja/OPD. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran atas keluaran dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

2.1.4.3 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang meliputi tahap-tahap yang ada. Dalam Modul Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPK, 2007:10) Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan strategik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan Kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Adapun siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2007

2.1.4.4 Tujuan dan Sasaran Akuntabilitas Kinerja

Dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah

Untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi Instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan dan referensi dalam menyusun penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu. Dimana penelitian ini di buat dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Wulandari (2018)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) - Pengendalian Akuntansi (X2) - Sistem Pelaporan (X3) - Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan - Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

	Karanganyar)	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) - 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Fathia (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja, dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus SKPD di Provinsi Riau)	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1) - Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X2) - Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) - Sistem Pelaporan Kinerja (X4) - Pengendalian Akuntansi (X5) - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus SKPD di Provinsi Riau) (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> - penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

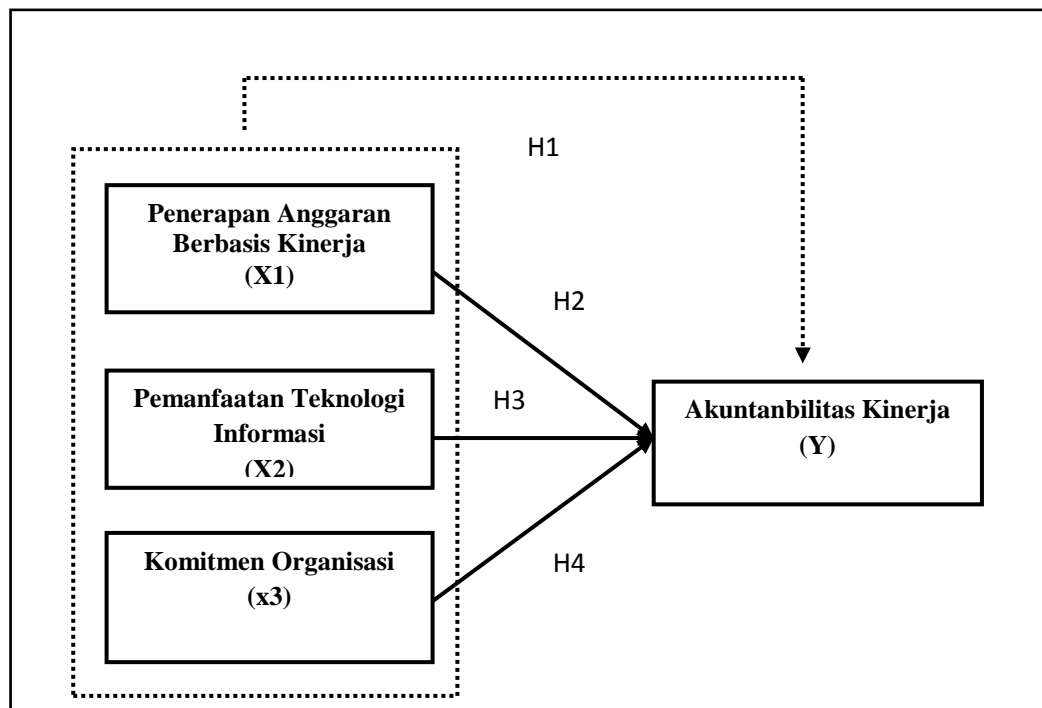
			Instansi Pemerintah
Indriyani, Diatmika, Wahyuni (2017)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar)	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Organisasi (X1) - Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) - Efektivitas Pengendalian Internal (X3) - Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar) (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi publik - kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi publik. - efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi publik - komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran, dan efektivitas pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi publik

Wulandari (2013)	Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Anggaran (X1) - Komitmen Organisasi (X2) - Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang) (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah - Komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
---------------------	--	--	---

Sumber : Diolah dari berbagai sumber (2019)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari latar belakang, tinjauan pustaka dan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka penulis menguraikan bentuk kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.2
Skema Kerangka Penelitian

Keterangan :

—→ : Pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen secara parsial

----→ : Pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen secara simultan

H₁ : Hipotesis 1

H₂ : Hipotesis 2

H₃ : Hipotesis 3

H₄ : Hipotesis 4

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara yang hendak di uji kebenarannya dengan melihat hasil analisis peneliti adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Diduga terdapat pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja.

H2 : Diduga terdapat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja.

H3 : Diduga terdapat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja.

H4 : Diduga terdapat pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja